

Nomor : 0234/SDM.06.02/F19000000/2025 21 Januari 2025
 Lampiran : 3 Set
 Sifat : Segera - Biasa
 Hal : Realisasi dan Pengelolaan Pelaksanaan Kepada
 Perjalanan Dinas Yth. *) terlampir

Menindaklanjuti hasil rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan SPPD pada tanggal 19 - 22 November 2024 bertempat di Aula Rinjani Kantor Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat dan realiasi biaya perjalanan dinas non diklat tahun 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketetapan pagu anggaran dan realiasi biaya tahun 2024, dengan persentase (polaritas negatif) berikut:

No	Unit	%
1	UP2K NTB	123,0%
2	UP3 Mataram	72,3%
3	UP3 Sumbawa	140,0%
4	UP3 Bima	221,7%
5	UPK Lombok	62,5%
6	UPK Tambora	121,6%
7	UPT Mataram	146,1%
8	UP2B NTB	119,8%
9	UP2D NTB	166,1%

2. Sesuai data Dashboard Kertas Kerja Monev SPPD Unit sampai tahun 2024, bahwa masih terdapat biaya perjalanan dinas non diklat yang belum terselesaikan, dengan jumlah (diluar dari yang belum dimasukan dan/atau dilaporkan) berikut:

No	Unit	Kewajiban SPPD (Rp.)	Link Dashboard
1	UP2K NTB	17.826.834	https://bit.ly/48J16s8
2	UP3 Mataram	112.117.626	https://bit.ly/3Z09IY8
3	UP3 Sumbawa	355.733.669	https://bit.ly/4hGPALc
4	UP3 Bima	150.105.929	https://bit.ly/3NZfDGk
5	UPK Lombok	66.814.700	https://bit.ly/3NW12vv
6	UPK Tambora	225.545.158	https://bit.ly/3UGTmB5
7	UPT Mataram	313.496.809	https://bit.ly/48ICUFZ
8	UP2B NTB	46.835.412	https://bit.ly/40wUYRA
9	UP2D NTB	67.343.872	https://bit.ly/4fCMJHl

3. Berkaitan Poin 2 di atas, jika masih terdapat perjalanan dinas non diklat dan/atau perjalanan dinas lainnya yang belum dimasukan dan/atau dilaporkan untuk dapat segera diproses dalam Dashboard Kertas Kerja Monev SPPD Unit sesuai *link* dashboard tersebut.

Mengingat pentingnya poin 1 s.d. 3 di atas, mohon untuk:

1. Unit menyusun rencana kerja, rencana anggaran biaya perjalanan dinas dan memperhitungkan frekuensi, lama waktu serta jumlah pejabat/pegawai yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas dalam 1 (satu) tahun sesuai anggaran;
2. Pejabat yang berwenang dalam memberikan perintah/persetujuan Perjalanan Dinas wajib memperhatikan pagu Perjalanan Dinas;
3. Dalam hal pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas harus sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan kelengkapan berikut:
 - a. Formulir Penerimaan Bukti Perjalanan Dinas;
 - b. Formulir Persetujuan Perjalanan Dinas (jika *reimburse*);
 - c. Laporan Perjalanan Dinas;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - e. *Invoice* transportasi dan penginapan (jika *reimburse*);
 - f. *Boarding pass* dan/atau bukti penginapan (jika ada transportasi dan/atau penginapan);
 - g. Bukti Stempel SPPD;
 - h. Dasar perjalanan dinas (contoh: surat undangan/nota dinas/surat tugas/SK Mutasi/berdasarkan jenis kegiatan perjalanan dinas).
4. Pelaksanaan perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Pelaksanaan dan Instruksi Direksi PT PLN (Persero) nomor 0035.E/DIR/2023 dan 0021.I/DIR/2022 (terlampir);
5. Berkaitan poin 1 s.d. 4 di atas, bersama ini mengundang Unit untuk dapat hadir dalam jaringan *via* Zoom yang rencana dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 24 Januari 2025

Jam : 15.00 WITA s.d. selesai

Agenda : 1. Refreshment Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perjalanan Dinas.

Zoom : *Link* Zoom akan disampaikan selanjutnya

Peserta :
 1. Asman Keuangan dan Umum Unit Pelaksana;
 2. *Team leader* Administrasi dan Umum/Keuangan dan Umum Unit Pelaksana;
 3. *Team leader* Pelayanan Pelanggan dan Administrasi/PIC Pengelola Perjalanan Dinas Unit Layanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

SENIOR MANAGER KEUANGAN,
KOMUNIKASI, DAN UMUM,



HARFRY JACK

Tembusan:

- MAN ASET PROP DAN MUM UIW NTB PLN

SALINAN

Surat No 0234/SDM.06.02/F19000000/2025
Tanggal 21 Januari 2025

*) Terlampir:

1. MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN MATARAM UP3 MATARAM
2. MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SUMBAWA UP3 SUMBAWA
3. MANAGER UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BIMA UP3 BIMA
4. MANAGER UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN LOMBOK UPK LOMBOK
5. MANAGER UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN TAMBORA UPK TAMBORA
6. MANAGER UNIT PELAKSANA PROYEK KETENAGALISTRIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UP2K PROV NTB
7. MANAGER UNIT PELAKSANA TRANSMISI MATARAM UPT MATARAM
8. MANAGER UNIT PELAKSANA PENGATUR BEBAN NUSA TENGGARA BARAT UP2B NTB
9. MANAGER UNIT PELAKSANA PENGATUR DISTRIBUSI NUSA TENGGARA BARAT UP2D NTB

SALINAN